

**EFEKTIVITAS PROGRAM STRATEGIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA,
SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN PEMBUDAYAAN IDEOLOGI PANCASILA
DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA PEMUDA
JAWA BARAT**

***Ardhan Irfan¹, Ika Sartika² & Imelda Hutasoit³**

Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

*Email Korespondensi: ardhan.irfan@gmail.com

ABSTRACT

Agency for Fostering Pancasila Ideology (BPIP) is a state auxiliary body established by President Joko Widodo through Presidential Regulation Number 7 of 2018 concerning the Agency for Pancasila Ideology Education. This institution was formed in response to the government's concern over the disappearance of Pancasila education among the younger generation after the Reform era. It has a Strategic Program focusing on Socialization, Communication, and Networking. This intensively implemented program targets various groups, including ministries/agencies, regional governments, socio-political organizations, other community components, and particularly the youth. As the nation's future generation, youth require special attention from the government due to technological developments that make them vulnerable to transnational ideologies, such as radicalism, consumerism, liberalism, and terrorism. These concerns are documented in key BPIP documents, ranging from Policy Directions to Strategic Plans articulated through policy regulations. The researcher seeks to analyze the effectiveness of the implementation of this Strategic Program, with the research locus limited to West Java Province. Using a qualitative research design with a descriptive approach, based on information gathered through interviews, the researcher proposes three problem formulations: First, how effective is the Strategic Program for Inter-Institutional Relations, Socialization, Communication, and Networking?; Second, what are the supporting and inhibiting factors in the effectiveness of this Strategic Program?; and Third, what is the strategic plan formulation to improve the effectiveness of the Strategic Program for Inter-Institutional Relations, Socialization, Communication, and Networking? Based on the effectiveness theory proposed by Gibson (2010), which includes production, efficiency, satisfaction, adaptation, and development, the researcher concludes: First, the Strategic Program can be considered effective; Second, the inhibiting factors of the Strategic Program include difficulties in coordination with local governments, overlapping program activities, uneven budget distribution, and the absence of technical guidelines; and Third, BPIP can strengthen inter-institutional coordination and communication, ensure equal and transparent budget allocation, develop clear and standardized technical guidelines, synchronize programs among units and related institutions, enhance the capacity of implementers and data-based evaluations, and formulate region-based strategic plans.

Keywords: Program Effectiveness, Socialization, Communication, Information Dissemination, Pancasila Ideology Development

PENDAHULUAN

Ideologi adalah cara berpikir masyarakat yang memiliki satu tujuan tertentu. Ideologi menurut kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai “kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat dan memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup”. Ideologi diartikan sebagai sistem

kepercayaan yang menjelaskan strategi yaitu prosedur, rancangan, instruksi, serta program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setiap negara memiliki ideologi nya masing masing yang digunakan sebagai pandangan dalam hidup bernegara. Ideologi yang tersebar di dunia ini antara lain ideologi komunis, ideologi kapitalisme – liberalistic, dan ideologi neo – liberalisme.

Giddens (2000) dalam bukunya Jalan Ketiga, melakukan kritik terhadap ideologi kapitalis, dan menurutnya Ideologi komunis telah memudar, paham sosialisme sudah tidak berlaku pada era kini. Maka dibutuhkan ideologi penengah yang dikenal dengan *the third way* atau jalan ketiga. Ideologi alternatif yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang timbul akibat ideologi kapitalis dan sosialis. Teori Giddens (2000) sejalan dengan teori Carol C. Gould yang mengharapkan adanya perluasan praktik demokrasi bukan hanya pada bidang politik namun juga pada bidang sosial ekonomi. Hal ini sesuai dengan ideologi yang dianut oleh Indonesia yaitu ideologi Pancasila yang menjunjung nilai demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.

Undang undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menjelaskan “pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”. Dalam *website* djkn.kemenkeu.go.id yang diakses oleh peneliti pada 24 April 2023 dijelaskan bahwa “pemuda adalah aset bangsa yang sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Pemuda adalah tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemuda memiliki arti yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas pemuda yang dimilikinya. Berdasarkan survey sosial ekonomi nasional (susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia kategori pemuda sebanyak 68,82 juta jiwa pada Maret 2022, dengan hampir separuh pemuda terpusat di Pulau Jawa. Berikut rincian yang didapat oleh peneliti, Jawa 54,79%, Sumatera 22,37%, Sulawesi 7,74%, Kalimantan 6,35%, kepulauan lainnya 8,75%.

Namun, terdapat permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemuda masa kini. Disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenpora RI dalam lokakarya Kontirbusi Media Online dalam Merawat Kebhinekaan Bangsa pada 19 September 2019 yaitu “setidaknya tiga masalah pemuda yang perlu menjadi perhatian, pertama degradasi moral dan nasionalisme, kedua penggunaan narkoba dikalangan pemuda yang tercatat pada tahun 2018 sebagai pengguna terbesar narkoba adalah pemuda, ketiga LGBT, akan tetapi yang paling mengkhawatirkan dari persoalan ini adalah narkoba dan radikalisme yang sudah menyasar pada lingkup perrguruan tinggi”. Sangat tidak dapat dibayangkan jika 43% penduduk Indonesia yang merupakan penduduk usia produktif terdampak narkoba dan radikalisme, tentu saja hal tersebut dapat menghancurkan tujuan negara.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu 48,64 juta jiwa per Juni 2022 berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian, diketahui komposisi jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 33,52 juta jiwa atau 68,9% penduduk usia produktif, dan 15,12 juta jiwa atau 31,09% penduduk usia tidak produktif. Menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak pada usia produktif hal tersebut dapat menjadi peluang namun juga dapat menjadi ancaman bagi pembangunan Provinsi Jawa Barat. Menjadi peluang jika penduduk usia produktif memiliki kualitas untuk membangun Provinsi Jawa Barat, dan menjadi ancaman jika kualitas penduduk usia produktif buruk sehingga menimbulkan permasalahan baru bagi Provinsi Jawa Barat.

Untuk memperkuat kualitas pemuda Provinsi Jawa Barat perlu disertai dengan penguatan mental dan ideologi Pancasila. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Jabar Bapak Rafael Situmorang yang menekankan bahwa perlunya menjaga nilai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya dan agama di Provinsi Jawa Barat , serta untuk memastikan keberlanjutan maju tegaknya NKRI.

Namun penanaman nilai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari Pemuda Jawa Barat merupakan tantangan besar yang harus menjadi perhatian bagi para pimpinan daerah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini bukan hanya dikarenakan banyaknya jumlah pemuda Provinsi Jawa Barat, namun juga tingginya keanekaragaman budaya dan agama yang dapat menjadi pemicu konflik antar pemuda di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2016 jelas bahwa tugas dan fungsi Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat berbeda dengan BPIP. Bakesbangpol Provinsi merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP sebagai pembuat kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila siap mendukung kegiatan bakesbangpol yang bersifat *workshop*, seminar, diklat dan bentuk lain dalam Pembinaan Ideologi Pancasila. Bakesbangpol sebagai pelaksana Pembinaan Ideologi Pancasila di daerah perlu bersinergi dengan berbagai pihak di daerah seperti guru, dalam Pembinaan Ideologi Pancasila di kalangan pelajar, dan Disdikpora untuk Pembinaan Ideologi Pancasila di kalangan pemuda.

Namun realita di lapangan peneliti mendapati bahwa pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada 5 pelajar sekolah menengah atas di Jawa Barat. Salah satu pelajar tersebut menyampaikan “saya sangat jarang mendapatkan informasi tentang pelatihan atau seminar Pembinaan Ideologi Pancasila, saya hanya mendapatkan pengetahuan terkait Ideologi Pancasila dari guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah”. Hal ini disetujui oleh empat pelajar lainnya. Selanjutnya peneliti juga memberikan pertanyaan “seberapa sering pelajar menemukan konten Pendidikan Ideologi Pancasila melalui media sosial?”. Seluruh pelajar sepakat untuk memberikan jawaban “jarang”. Artinya media yang digunakan sebagai pembinaan Ideologi Pancasila kepada pemuda masih minim.

Selain minimnya media pembinaan Ideologi Pancasila bagi pemuda alasan kurangnya pendidikan Ideologi Pancasila juga diakibatkan minimnya sumber belajar yang dibutuhkan pemuda untuk mempelajari Ideologi Pancasila. BPIP sebagai lembaga yang memiliki fungsi pembinaan Ideologi Pancasila belum efektif dalam menyebarkan materi pembinaan Ideologi Pancasila. Padahal hal ini perlu dilakukan oleh BPIP agar materi pembinaan Ideologi Pancasila dapat diakses oleh pemuda sehingga pembinaan Ideologi Pancasila pada pemuda dapat terus berjalan.

Pembinaan ideologi Pancasila pada kalangan pemuda memang memiliki tantangan tersendiri. Ditengah gempuran modernisasi yang terus berkembang BPIP juga perlu menyeimbangkan pola komunikasi untuk memaksimalkan pembinaan ideologi Pancasila. Peneliti menganalisa keadaan yang terjadi saat ini, komunikasi yang terjalin antara BPIP dan pemuda khususnya pemuda Jawa Barat belum maksimal. Hal ini terlihat dari program pembinaan ideologi Pancasila yang telah diselenggarakan dalam laporan pelaksanaan kinerja BPIP 2023 menunjukkan masih minimnya program kegiatan yang melibatkan pemuda.

Selain itu, BPIP belum memaksimalkan penggunaan media sosial yang tengah menjadi *trend* dikalangan pemuda sebagai media komunikasi. BPIP memiliki *account* media sosial *instagram* dan *twitter* atau yang dikenal dengan "x". Namun penggunaan media sosial BPIP hanya memberikan informasi

terkait kegiatan yang dilakukan oleh BPIP. Selain itu konten yang disediakan oleh BPIP kurang menarik, hal ini dapat dilihat dari jumlah like dan *comment* yang terdapat pada konten yang diunggah pada media sosial *instagram*. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin hanya satu arah dan antara BPIP dengan pemuda belum belum terjadi komunikasi yang efektif.

Ideologi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *idea* yang memiliki arti ide, gagasan, konsep atau cita – cita yang bersifat statis dan diyakini kebenarannya, dan *logos* memiliki arti ilmu atau pengetahuan, sehingga secara harfiah ideologi memiliki arti ilmu pengetahuan tentang ide atau pengertian dasar. Ideologi juga memiliki arti “ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan, sedemikian rupa, sehingga orang menganggapnya sah”. Pengertian ini dijelaskan oleh Karl Marx dalam Sobur (2013:212). Ideologi dianggap sebagai keseluruhan mekanisme suatu keadaan yang terdiri dari struktur dan sistem kemudian diyakini dan dianggap sah.

Fungsi lain ideologi dijelaskan oleh Rodee (2006) “ideologi memberikan legitimasi atau dasar hukum, bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya”. Pemerintah dapat menggunakan ideologi untuk memberikan pembenaran atas tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi lain ideologi juga dijelaskan oleh Sogito (2003) yaitu “ideologi dapat digunakan untuk mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat”. Dengan adanya ideologi diharapkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat dalam proses kehidupan. Ball & Degger (2002) menjelaskan bahwa “*ideologies are a strong stimulus of human behaviour as they shape people’s way of thinking, values, dreams, and even entire human lives*. Ideologi adalah pengaruh kuat dalam perilaku manusia yang membentuk pola pikir, pandangan nilai, harapan dan bahkan seluruh kehidupan manusia”. Ideologi dapat mempengaruhi seluruh kehidupan manusia karena ideologi membentuk pola pikir manusia dalam menjalankan hidup.

Efektivitas organisasi menurut febi (2015) adalah "merupakan hasil efektivitas individu dan kelompok, yang mampu melebihi jumlah efektivitas individu dan kelompok. Artinya tingkatan prestasi yang didapatkan lebih tinggi prestasi organisasi dibandingkan prestasi masing masing bagian". Dalam efektivitas organisasi terdapat hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi.

METODE

Desain penelitian adalah proses yang dibutuhkan selama pelaksanaan penelitian, meliputi perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang mencakup identifikasi masalah hingga pelaporan hasil penelitian. Nazir (2017:72) mengatakan “desain pelaksanaan penelitian meliputi proses percobaan, pengamatan, serta pengukuran variable, memilih prosedur, dan Teknik pengumpulan data, memproses data hingga membuat laporan penelitian”. Creswell (2003:5-6) juga menjelaskan tentang desain penelitian,, “Desain penelitian adalah suatu perencanaan untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan dalam penelitian, strategi ini meliputi prosedur, analisis, Teknik, dan metode apa yang akan digunakan untuk mencapai hasil penelitian”.

Creswell (2003:17) menjelaskan untuk menentukan desain penelitian, peneliti perlu memperhatikan tiga hal berikut, yaitu “masalah penelitian, pengalaman peneliti, dan untuk siapa penelitian ini dilakukan”. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap identifikasi permasalahan pada penelitian optimalisasi kualitas pelayanan publik melalui mal pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Cimahi, peneliti menentukan desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

Produksi

Peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas Gibson (2010) yang terdiri dari 5 indikator pengukuran efektivitas Deputy I pada BPIP. Indikator pertama adalah produksi. Indikator produksi digunakan peneliti untuk menganalisa keberhasilan jumlah serta mutu kerja yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat sebelumnya. Semakin sesuai maka dianggap semakin efektif, dan sebaliknya.

Peneliti menganalisa kesesuaian hasil dengan rencana Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan pada BPIP. Peneliti juga melakukan analisa terkait dasar hukum kegiatan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan pada BPIP. Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan program kegiatan serta landasan hukum yang jelas menjadi indikator bahwa Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan pada BPIP telah efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan pada BPIP memiliki sasaran strategis, terwujudnya aktualisasi nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diukur melalui nilai indeks aktualisasi Pancasila. Sasaran strategis kedua adalah terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelebagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/D, yang diukur melalui indikator presentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP, efektivitas model/media sosialisasi komunikasi dan jaringan, dan presentase atas efektivitas pemberdayaan nilai Pancasila.

Terkait Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan pada BPIP peneliti telah mewawancarai bapak Prakoso selaku Deputy I “Pertama kali, dalam sosialisasi kita harus lihat segmentasi. Segmentasinya itu bisa karena usia, umur, jadi untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa, orang tua, dan disabilitas. Ya, gitu ya. Jadi ada kurang lebih ada lima. Itu untuk segmentasi usia. Usia terus ada khusus tadi. Usia satu, anak-anak, terus remaja, dewasa, orang tua. Terus artinya ada segmen khusus, Karena tertentu tadi, karena ini alat khusus ini kan. Itu dalam sosialisasi. Terus ada melalui tingkat pendidikan. Ada untuk orang yang berpendidikan, karena kan untuk mencakup seluruh rakyat Indonesia. Berpendidikan, pendidikan formal, informal, dan non-formal.

Terus dari tingkat kejangkauannya. Perakotaan, di perakotaan, desa, atau remote area, atau daerah terpinggir kan. Dan satu lagi, luar negeri. Ini kan sosialisasi dan komunikasi. Itu cakupannya. Terus, instrumennya itu bisa langsung, melalui elektronik, atau tidak langsung melalui elektronik, ataupun blended. Itu. Jadi yang langsung itu kita datang ke lokus, dan kita melakukan sosialisasi terhadap pembinaan ideologi Pancasila. Terus yang melalui elektronik, ya itu dengan zoom, terus dengan TV, dengan radio, dengan film. Itu melalui alat. Multimedia, atau TikTok, atau sosial media, atau blended. Jadi kita ada di suatu tempat, langsung pada audiens, tapi kita menggunakan instrumen untuk disebar. Itu adalah blended. Dan juga, kalau nan jauh di sana, ya itu dengan virtual expo, atau virtual. Virtual. Virtual, karena mencakup panggilan. Makanya, hari-hari ini kita mendesain virtual expo yang nanti akan saya launching, Pak Kepala, atau Ibu Dewan Pengarah, itu 1 Juni.” (Wawancara, April 2025).

Namun peneliti juga melakukan wawancara kepada 120 siswa SMA di Bandung, Kuningan dan Sumedang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari 120 orang siswa 21 orang tidak mengetahui tentang BPIP, dan 99 orang mengetahui tentang BPIP. Peneliti juga menanyakan terkait tugas pokok

dan fungsi Deputy I BPIP dan 56 orang menjawab tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi Deputy I BPP, 64 menjawab mengetahui tugas pokok dan fungsi Deputy I BPIP. Kemudian peneliti menanyakan lebih jelas lagi kepada 64 siswa dengan jawaban mengetahui tugas pokok dan fungsi Deputy I BPIP, dan semua jawaban salah.

Efisiensi

Indikator kedua adalah efisiensi. Melalui indikator ini peneliti menganalisa perbandingan antara hasil kerja yang diperoleh dengan sumber yang digunakan. Sumber tersebut yaitu biaya, waktu dan tenaga. Besarnya sumber biaya, waktu dan tenaga yang digunakan harus sesuai dengan hasil kerja organisasi. Artinya semakin besar sumber yang digunakan maka hasil kerja harus semakin maksimal. Sehingga suatu kegiatan dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan rincian kertas kerja satuan kerja BPIP pada tahun anggaran 2024, BPIP memiliki anggaran operasional sebesar Rp. 344.159.855.000 atau sebesar tiga ratus empat puluh empat milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah. Dengan alokasi dana pada deputy penyelenggaraan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan sebesar Rp. 69.682.408.000 atau terbilang enam puluh Sembilan milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan ribu rupiah. 20,2% anggaran BPIP diperuntukan menunjang kegiatan Deputy I penyelenggaraan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan.

Dengan jumlah pegawai dan besarnya anggaran yang dimiliki oleh Deputy I pada BPIP diharapkan proses pelayanan dapat dilaksanakan dengan kejelasan prosedur, ketepatan waktu dan ketepatan sasaran. Dalam pelaksanaan kegiatan BPIP selalu didasari oleh perencanaan sehingga kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana akan terukur melalui Indeks Aktualisasi Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan dalam proses pembangunan, karena tolok ukur keberhasilan pembangunan negara bukan hanya dari peningkatan pendapatan nasional tapi juga peningkatan dalam nilai nilai kemanusiaan melalui pengamalan nilai nilai Pancasila. Indeks aktualisasi Pancasila merupakan alat untuk mengukur sejauh mana pengamalan nilai Pancasila diimplementasikan. Berdasarkan laporan Indeks Aktualisasi Pancasila tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat, aktualisasi Sila pertama terukur sebesar 68,88%, Sila kedua sebesar 76,86%, Sila ketiga 78,33%, Sila keempat 71,11%, dan Sila kelima sebesar 81,88%. Dengan target nilai 100% maka Indeks Aktualisasi Pancasila di Provinsi Jawa Barat dinilai cukup tercapai. Artinya kesesuaian perencanaan Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan di Jawa Barat cukup sesuai prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Deputy I BPIP Bapak Prof. Agus Nadjib pada tanggal 28 April 2024, menjelaskan “perencanaan pada Deputy I BPIP memang ada, dan harus dilakukan. Hal tersebut tertuang dalam Renstra dan Renja BPIP. Pada renstra dan renja juga tercantum fokus objek dari kegiatan Deputy I BPIP, apakah ASN, Perguruan tinggi, atau pemuda. Namun dalam pelaksanaan perencanaan tersebut tetap disesuaikan dengan kondisi lapangan, dengan tidak menghilangkan bagian dari perencanaan. Hanya saja mengubah urutan prioritas pelaksanaan kegiatan, dan belum dibuatnya petunjuk teknis kegiatan, yang saat ini masih dalam proses. Selain itu tidak adanya Lembaga perwakilan di bawah juga menjadi salah satu faktor penghambat”. Prinsipnya, Program Strategis Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan oleh Deputy I BPIP telah terencana, namun dalam keefektifan pelaksanaannya tergantung pada situasi dan

kondisi di lapangan dan juga terkendala belum adanya petunjuk teknis kegiatan. Selain kondisi dan juknis yang belum tersedia, tidak adanya instansi vertikal di bawah BPIP juga menghambat realisasi program Deputy I BPIP yg telah direncanakan sehingga sulit menjalin Kerjasama dengan komunikasi dengan objek program Deputy I BPIP.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sampai saat ini, BPIP yang menjalankan fungsi pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, masih merasakan kesulitan untuk membuat program yang efisien. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling utama adalah ketiadaan instansi vertikal yang dapat menjembatani program/kegiatan BPIP di Tingkat pusat untuk dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh Masyarakat khususnya pemuda di Jawa Barat.

Kepuasan

Indikator kepuasan adalah kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pegawai, yang dilihat dari etika pegawai. Melalui indikator ini peneliti melakukan analisa terhadap etika pegawai. Semakin baik etika pegawai pada Direktorat Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan serta Pembudayaan pada BPIP maka pemenuhan kebutuhan pegawainya telah terpenuhi oleh organisasi. Hal tersebut menunjukkan Direktorat Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan serta Pembudayaan pada BPIP telah efektif.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil dan/atau nonpegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPIP. Berikut adalah hak keuangan, gaji pegawai dan tunjangan kinerja berdasarkan laporan realisasi SP2D TA 2024 periode September 2024.

Adaptasi

Indikator keempat adalah adaptasi. Melalui indikator ini peneliti melakukan analisa terhadap kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan dan perkembangan lingkungan. Kemampuan Direktorat Sosialisasi Komunikasi dan Direktorat Jaringan serta Pembudayaan pada BPIP dalam menghadapi perubahan zaman, penggunaan teknologi dan pola pikir pemuda gen z, menunjukkan tingkat efektivitas Direktorat Sosialisasi Komunikasi dan Direktorat Jaringan serta Pembudayaan pada BPIP.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dirilis dalam Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XXIV pada 21 Januari 2021 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Pada Tahun 2045 diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Hasil sensus tersebut juga menunjukkan bahwa komposisi penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh para pemuda atau lebih dikenal sebagai Generasi Z dan Milenial. Dari total jumlah penduduk itu sebesar 27,94% merupakan Generasi Z (lahir tahun 1997-2012) dan sebesar 25,87% merupakan Generasi

Milenial (lahir tahun 1981-1996). Kemudian, sebesar 21,88% adalah Generasi X (lahir tahun 1965-1980), sebesar 11,56% adalah Baby Boomer (lahir tahun 1946-1964), sebesar 10,88% adalah Post Generasi Z (lahir 2013 dan seterusnya), dan sebesar 1,87% adalah Pre-Boomer (lahir sebelum Tahun 1945). Apabila dilihat berdasarkan usia produktif (15-64 tahun), maka jumlah penduduk Indonesia dalam usia produktif adalah sebesar 70,72%.

Mencermati penjelasan di atas, konten terkait ideologi Pancasila seharusnya tidak hanya dibuat semenarik mungkin, namun juga harus terlebih dahulu memuat kebenaran yang diyakini. Merujuk kepada Marx, Ideologi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *idea* yang memiliki arti ide, gagasan, konsep atau cita - cita yang bersifat statis dan diyakini kebenarannya, dan *logos* memiliki arti ilmu atau pengetahuan, sehingga secara harfiah ideologi memiliki arti ilmu pengetahuan tentang ide atau pengertian dasar. Ideologi juga memiliki arti “ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan, sedemikian rupa, sehingga orang menganggapnya sah”. Generasi Muda ditandai dengan kritisisme dan skeptisisme terhadap struktur kekuasaan yang ada. Maka, untuk menyampaikan ide dan atau gagasan di dalam konten, yang terlebih dahulu harus dimuat adalah nilai kebenaran alih-alih memikirkan segi estetis belaka.

Pada titik ini, yang seharusnya bertanggung jawab terhadap dampak dari Program Strategis Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Pembinaan Ideologi Pancasila bukan hanya BPIP, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah dalam arti luas.

Perkembangan

Indikator terakhir adalah perkembangan. Indikator ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Semakin banyak target yang dapat dipenuhi maka semakin efektif suatu organisasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Cris Simon selaku Pelaksana pada Direktorat Sosialisasi Komunikasi terkait pemenuhan sarana prasarana di dalam organisasi, beliau menyatakan “Sarana prasarana dirasa sangat kurang, seperti halnya penyediaan studio untuk podcast. otomatis kita setiap melakukan perjalanan dinas, kegiatan sosialisasi, kita lakukan podcast. Kebetulan juga narasumbernya yang dijadikan narasumber kegiatan sosialisasinya, kita jadikan narasumber di podcast juga. Kemudian ketidaklengkapan sarana prasarana dalam membuat konten animasi baik *creator* maupun alatnya.”

Menurut data yang peneliti temukan terkait tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik target tahun 2024 adalah 5 Nilai. Pada Triwulan I Tahun 2024 capaian target tersebut adalah sebesar 100% Nilai dengan uraian capaian bahwa saat ini masih dilakukan proses sosialisasi dan komunikasi dan penilaian dilakukan di akhir tahun untuk semua konten yang dibuat.

Dalam menghadapi perubahan eksternal dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada selain pemanfaatan penggunaan teknologi dan media sosial BPIP juga melakukan jaringan kemitraan. Hal tersebut dinyatakan dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan serta Pembudayaan pada BPIP, bahwa “ada direktorat jaringan dan pembudayaan yang merangkul anak muda dan komunitas. kita ada target 400 komunitas per tahun ini.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Hanif selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Direktorat Sosialisasi Komunikasi, beliau menyatakan bahwa “Kalau jaringan kemitraan tentunya kami ada dengan beberapa, bukan beberapa sih, kami mengoptimalkan, saat ini sedang mengoptimalkan

tindak lanjut kerjasama dengan beberapa instansi yang telah melakukan kerjasama dengan BPIP. Contoh, memang tahun, dua tahun lalu kalau tidak salah, sempat kita juga audiensi dengan Pemkot Bekasi, kita berusaha pendekatan mereka bagaimana materi-materi atau konten-konten PIP yang telah diproduksi oleh Direktur Sosialisasi bisa dipublikasikan di ruang terbuka, dalam hari seperti reklame, baliho, dan juga LED videotron yang ada di kota Bekasi, di mana memang biasanya pemda-pemda atau pemkot, pemprov ini memiliki porsi untuk Biro Humas yang mereka. Jadi kita berusaha masuk ke mereka, ditambah juga ini penguatan dari Pak Sestama. Beliau berharap seluruh strategi sosialisasi dan komunikasi PIP di ruang publik, seperti di reklame dan juga LED iklan-iklan lain masyarakat itu, harapan beliau, terutama di masa era kemarin, efisiensi anggaran, harapannya agar dimanfaatkan betul-betul kerjasama yang ada. Jadi bagaimana agar tetap kita konten-konten materi PIP kita tetap tersebar secara luas namun dengan biaya minim. Bahkan kalau bisa gratis. Seperti tadi yang di Pemprov Bekasi menawarkan secara cuma-cuma juga bagaimana konten-konten PIP kita bisa tersebar luas kan bagi masyarakat kota Bekasi.”

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Direktorat Sosialisasi Komunikasi pada BPIP telah berupaya menjalankan peran strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda melalui berbagai program dan kegiatan. Namun, efektivitas pelaksanaan pembinaan masih menghadapi sejumlah tantangan. Faktor-faktor penghambat yang utama meliputi, Faktor penghambat yang ditemukan oleh peneliti diantaranya: 1) Sulitnya koordinasi instansi daerah dengan BPIP; 2) Adanya tumpang tindih program kegiatan; 3) Anggaran yang tidak merata; 4) Tidak adanya juknis kegiatan. Meskipun terdapat hambatan, temuan juga menunjukkan adanya potensi besar untuk perbaikan. Dengan adanya faktor pendukung antara lain; 1) Tersedianya anggaran; 2) Teknologi mempermudah penyebaran informasi kepada pemuda; 3) Tersedianya sumber daya manusia pada direktorat sosialisasi komunikasi pada bPIP yang mumpuni; 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di kantor BPIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. (1984). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: CV. Rajawali
- Amin, M.M. (2015). *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*. Yogyakarta: Calpulis.
- Arfani, Riza Noer. (1996). *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Ideologi Pancasila dan Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Bahar, Safroedin. (1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Bakry, Noor Ms. (2010). *Pendidikan Pancasila*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Budimansyah, Dasim. (2008). *Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarahnya di Indonesia*. HISTORIA:Journal of Historical Studies, IX, 1 (June 2008).
- Burhan, Bungin. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Prenada Grafindo Persada.

- Cholisin. (2012). *Budaya Politik Indonesia Dalam Pembelajaran PKn*. Yogyakarta: UNY
- Creswell, John W & J. David Creswell. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. SAGE Publications, Inc.
- Danial, Endang. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Darmodihardjo D. (1978). *Orientasi Singkat Pancasila*. Jakarta: PT. Gita Karya Darmodihardjo, D dkk. (1996). *Santiaji Pancasila Edisi Revisi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gibson, James L. et al. (1996). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Giddens, Anthony. (2017). *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas Anthony Giddens (Hadi Purwanto (Ed.); 5th Ed.)*. Kreasi Wacana.
- Hasim, M. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Quadra.
- Hatta, Mohammad. (2015). *Mohammad Hatta Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Ibn Faris bin Zakaria, Abu al-Husain. (1972). *Mu'jam Maqayis al- Lughat Jilid III. Mesir : Mustafa al- Halabi wa Syarikah*.
- Kaelan. (2000). *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.
- Karsadi. (2014). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Upaya Membangun Moral Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kaderi, Alwi. (2015). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Karl Marx dan Frederick Engels. (2013). *Ideologi Jerman Jilid 1, Feuerbach , Diterjemahkan dari THE GERMAN IDEOLOGY, alih bahasa, Nasikhul Mutamanna*, Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna (historisitas, rasionalitas, dan aktualitas)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mahfud MD, Moh. (2001). *Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleng, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mumpuni, A (2018). *Integrasi Nilai Karakter Dalam Buku Pelajaran Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution. (2003). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh Notosusanto, Nugroho. (1981). *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. PN Jakarta: Balai Pustaka
- Poerwadarminta, W.J.S. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Jakarata: PN Balai Pustaka
- Ruppert Woodfin dan Oscar Zarate. (2008). *Mengenal Marxisme*, Yogyakarta: Resist Book.
- Ruyadi, Y. (2003). *Buku Tugas Belajar Mandiri Pendidikan Pancasila*. Bandung: CV. Maulana.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Srijanti dan Rahman A, dkk. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suny, Ismail. (1983). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.

- Sutedi, Adrian. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutrisno, Slamet. (2006). *"Filsafat dan Ideologi Pancasila"*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zulkifli, Suleman. (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Abi, A.R. (2017). *Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 2045*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 86.
- Achmad Mobarok, MA, Prof.Dr. (2008). *Aktualisasi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa*. Neliti.
- Anjar, A., Adi, P. N., Siregar, M., Siregar, Z. A., & Sepriani, Y. (2020). Civic Education Teachers' Response to The Establishment of Pancasila Ideology Agency (BPIP). *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 36(1), 12-20. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i1.4794>
- Arif, S. (2018). Pola Pembinaan dan Pendidikan Pancasila Komparasi Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi. *Prisma*, 26(1), 59-72.
- BPIP. (2020). *Matrik Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 | 1 Matrik Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 | 2 (Issue 1)*.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2023). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy I*. BPIP.
- . *Laporan Triwulan I dan II Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024*. BPIP.
- . *Laporan Realisasi SP2D Tahun Anggaran 2024*. BPIP.
- Darmawan. (2018). *Tesis Revitalisasi Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bermasyarakat di Era Globalisasi*.
- Dewi, S., & Utama, A. S. (2018). *Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Era Reformasi Sandra*. 1(69), 5-24.
- Muttaqin, Labib. (2018). *Tesis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Perspektif Lembaga Non Struktural dan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Perubahan Kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Kelembagaan Ideologi Pancasila Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)*.
- Nursin. (2020). *Tesis Strategi Penanaman Ideologi Kebangsaan di Pondok Pesantren Ash-Shiddiqi Mataram Ilir Seputih Surabaya Lampung Tengah*.